BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/878/K/411.013/2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dan dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
Memuat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diampu oleh masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat kebijakan umum rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perlunya perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

d. BAB IV : PENUTUP.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen Perubahan Rencana Kerja dari:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
n. Dinas Perhubungan;
o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

t. Dinas Pertanian;
u. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
v. Sekretariat Daerah;
w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
z. Badan Pendapatan Daerah;
aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
bb. Inspektorat;
cc. Kecamatan Bagor;
dd. Kecamatan Baron;
ee. Kecamatan Berbek;
ff. Kecamatan Gondang;
gg. Kecamatan Jatikalen;
hh. Kecamatan Kertosono;
ii. Kecamatan Lengkong;
jj. Kecamatan Loceret;
kk. Kecamatan Nganjuk;
ll. Kecamatan Ngetos;
mm. Kecamatan Ngluyu;
nn. Kecamatan Ngronggot;
oo. Kecamatan Pace;
pp. Kecamatan Patianrowo;
qq. Kecamatan Prambon;
rr. Kecamatan Rejoso;
ss. Kecamatan Sawahan;
tt. Kecamatan Sukomoro;
uu. Kecamatan Tanjunganom;
vv. Kecamatan Wilangan; dan
ww. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XXIX
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 878 /K/411.013/2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana Pembangunan daerah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau

c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan - Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2024;
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;

c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berkenaan;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
- 3.2. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berkenaan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan									
	Fungsi Penunjang Pengawasan									
	Bidang Pengawasan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota	**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah**	-	-	**90%**	**85,37%**	**94,85%**	-	-	-
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	**87**	-	-	-	-	**85**	**81,70**	**96,11%**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**14 dokumen**	-	-	-	-	**14 dokumen**	**7 dokumen**	**50%**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
		Daerah yang disusun								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	-

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	7 laporan	-	7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	5 laporan	71,42%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
		dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7 dokumen**	-	-	-	-	**4 dokumen**	**2 dokumen**	**50%**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
		Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD								
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**63 dokumen**	-	-	-	-	**63 dokumen**	**9 dokumen**	**14,28%**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang/bln	-	51 orang/bln	51 orang/bln	98,14%	55 orang/bln	51 orang/bln	92,72%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	52 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
		SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	6 laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**51 dokumen**	-	-	-	-	**55 dokumen**	**51 dokumen**	**92,72%**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	4 unit	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	110 paket	-	118 paket	118 paket	100%	-	-	-
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	55 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	-	54 orang	48 orang	88,88%	45 orang	20 orang	44,44%
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	55 orang	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	55 orang	-	54 orang	51 orang	94,44%	55 orang	51 orang	92,72%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**51 dokumen**	-	-	-	-	**51 dokumen**	**18 dokumen**	**35,29%**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	-	4 paket	4 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	-	4 paket	4 paket	100%	5 paket	2 paket	40%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	-	4 paket	4 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	-	4 paket	4 paket	100%	4 paket	2 paket	50%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	-	4 paket	4 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	4 laporan	33,33%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	-	36 laporan	86 laporan	100%	36 laporan	4 laporan	11,11%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**80 unit**	-	-	-	-	**161 unit**	**81 unit**	**50,3%**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	45 unit	-	55 unit	55 unit	100%	85 unit	5 unit	5,88%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 unit	-	193 unit	193 unit	100%	76 unit	76 unit	100%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 laporan**	-	-	-	-	**12 laporan**	**6 laporan**	**50%**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**105 unit**	-	-	-	-	**221 unit**	**111 unit**	**50,22%**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenadaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 unit	-	12 unit	12 unit	100%	12 unit	6 unit	50%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	35 unit	-	28 unit	25 unit	89,28%	45 unit	45 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48 unit	-	45 unit	104 unit	144,44%	161 unit	57 unit	35,4%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	-	4 unit	4 unit	100%	3 unit	3 unit	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase PKPT yang dilaksanakan**	-	-	**100%**	**90,75%**	**90,75%**	-	-	-
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	**70%**	-	-	-	-	**60%**	-	-
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Terselenggaranya pengawasan internal**	-	-	100%	88,69%	88,69%	-	-	-
		Jumlah PD yang menerapkan manajemen risiko	**35 OPD**	-	-	-	-	30 OPD	50 OPD	166%
		Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu	**100%**	-	-	-	-	100%	100%	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
		Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	**80%**	-	-	-	-	70%	95,3%	136,14%
		Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	**92%**	-	-	-	-	90%	84,48%	93,86%
	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100%	8 laporan	-	-
	Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	10 laporan	-	10 laporan	7 laporan	70%	-	-	-
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	2 laporan	1 laporan	50%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	-	119 laporan	124 laporan	104,20%	119 laporan	50 laporan	42,01%
	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	-	75 laporan	35 laporan	46,66%	100 laporan	35 laporan	35%
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	-	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100%	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	6 dokumen	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	3 dokumen	50%
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu**	-	-	95%	87,5%	87,5%	-	-	-

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
		Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan	**8 laporan**	-	-	-	-	8 laporan	8 laporan	100%
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	4 laporan	-	4 laporan	1 laporan	25%	-	-	-
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 laporan	-	4 laporan	6 laporan	150%	4 laporan	2 laporan	50%
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target**	-	-	80%	86%	107,5%	-	-	-
		Persentase Perangkat	**15%**	-	-	-	-	10%	-	-

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
					Daerah yang melakukan FCP (*Fraud Control Planning*)								
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
					Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	**2 kegiatan**	-	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	50%
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	-	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	1 rekomendasi	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang	1 rekomendasi	-	1 rekomendas	1 rekomend	100%	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Pengawasan	fasilitasi pengawasan yang disusun			i	asi				
	Pendampingan dan Asistensi	**Terselenggaranya pendampingan dan asistensi**	-	-	90%	92,6%	102,77%	-	-	-
		Jumlah perangkat daerah yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	**52 OPD**	-	-	-	-	52 OPD	52 OPD	100%
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	52 OPD	-	50 OPD	50 OPD	100%	52 OPD	52 OPD	100%
	Pendampingan, Asistensi,	Jumlah perangkat daerah	52 OPD	-	30 OPD	21 OPD	70%	52 OPD	52 OPD	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi								
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verivikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan	-	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakkan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	52 OPD	-	50 OPD	50 OPD	100%	52 OPD	-	-

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2024 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja s.d Tribulan II tahun 2024	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96,12%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah yaitu 81,7 dari target nilai 85 yang telah ditetapkan. Dikarenakan masih adanya rekomendasi dari komponen perencanaan kinerja	Dari rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti
Program Penyelenggaran Pengawasan	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Kegiatan Penilaian SPIP belum dilaksanakan, dikarenakan aplikasi SPIP masih error	
Program Perumusan Kebijakan,	0%	Sangat Rendah

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja s.d Tribulan II tahun 2024	Predikat
Pendampingan dan Asistensi		
Faktor Penyebab	Konsep Keputusan Bupati tentang Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud Control Plan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih belum disusun	

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Renstra

NO	Indikator	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian	Proyeksi
				Tahun 2024	Tahun 2024 (TW II)	Tahun 2024
1	2	3	4	5	8	12
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart*	√		30%	36%	30%
2	Level Kapabilitas APIP**		√	3 (3,000)	3 (3,000)	3 (3,100)
3	Nilai Maturitas SPIP**			3,150	3,169	3,200

*Untuk persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart pada tribulan II masih sama seperti tahun 2023, karena pada tahun 2024 masih belum dilakukan proses penilaian

** Level Kapabilitas APIP dan Nilai Maturitas SPIP sesuai dengan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur hal Pemberitahuan Penetapan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	3,150
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2024**
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	30 %

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.
Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan perubahan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.2
Perubahan RKPD 2024

No	APBD Tahun 2024				Perubahan RKPD Tahun 2024			Tetap/Kurang/Tambah	Keterangan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
	1	2	3	4	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**85**	**11.970.193,980**	**Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota**	**85**	**11.942.815,888**		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**14 dokumen**	**106.140**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11 dokumen**	**71.767**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	47.275,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	28.560	Kurang	Pengurangan honorarium narasumber dan lembur
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	15.718,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	15.718,500	Tetap	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan	1 dokumen	15.718,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.718,500	Tetap	-

No	APBD Tahun 2024				Perubahan RKPD Tahun 2024			Tetap/Kurang/Tambah	Keterangan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
	1	2	3	4	8	9	10	11	12
		RKA-SKPD							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	27.427,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	11.770	Kurang	Pengurangan honor lembur
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7 dokumen**	**50.451**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**18 dokumen**	**50.451**		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	9.471	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	9.471	Tetap	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	40.980	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 laporan	40.980	Tetap	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**63 dokumen**	**8.788.113,500**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**63 dokumen**	**7.874.357**		

No	APBD Tahun 2024				Perubahan RKPD Tahun 2024			Tetap/Kurang/Tambah	Keterangan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
	1	2	3	4	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang/bln	8.714.591	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bln	7.794.056	Kurang	Pengurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	52 dokumen	58.680	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	52 dokumen	71.280	Tambah	Penambahan honorarium PPTK
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	14.842,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	9.021	Kurang	Pengurangan lembur karena kegiatan sudah dilakukan awal tahun
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**55 dokumen**	**560.462,620**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**55 dokumen**	**1.002.416,620**		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	499.816,620	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45 orang	722.236,620	Tambah	Penambahan belanja kursus singkat dan pelatihan sesuai mandatory 120 jam/tahun
	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi	55 orang	76.396	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	55 orang	280.180	Tambah	Kegiatan pelatihan service excellent-full

No	APBD Tahun 2024				Perubahan RKPD Tahun 2024			Tetap/Kurang/Tambah	Keterangan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
	1	2	3	4	8	9	10	11	12
	Peraturan Perundang-Undangan	peraturan perundang-undangan			Perundang-Undangan				klasikal
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**51 dokumen**	**551.426,275**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**50 dokumen**	**675.606,775**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	29.097,130	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	29.097,130	Tetap	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	13.902,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	13.902,600	Tetap	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	16.759	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 paket	21.002	Tambah	Penambahan peralatan rumah tangga
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	188.706,195	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 paket	188.706,195	Tetap	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	32.478,850	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 paket	32.478,850	Tetap	-
	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan	1 dokume	12.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan	1 dokume	12.000	Tetap	-

No	APBD Tahun 2024				Perubahan RKPD Tahun 2024			Tetap/Kurang/Tambah	Keterangan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
	1	2	3	4	8	9	10	11	12
	dan Peraturan Perundang-undangan	peraturan perundang-undangan yang disediakan	n		Peraturan Perundang-undangan	n			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12.032,500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	15.970	Tambah	Penambahan untuk makan minum tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	246.450	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	312.450	Tambah	Penambahan makan minum rapat dan perjalanan dinas
	-	-	-	-	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	50.000	Tambah	Pemeliharaan aplikasi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**73 unit**	**1.006.694,285**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**188 unit**	**1.107.636,793**		
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	40 unit	261.335,250	Pengadaan Mebel	99 unit	310.509,925	Tambah	Penambahan kursi rapat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 unit	745.359,035	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89 unit	797.126,868	Tambah	Layar LCD, AC, dispenser, handphone, lemari es, smoke

No	APBD Tahun 2024				Perubahan RKPD Tahun 2024			Tetap/Kurang/Tambah	Keterangan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
	1	2	3	4	8	9	10	11	12
									detector
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 laporan**	**221.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 laporan**	**221.800**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	10.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	10.000	Tetap	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	114.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	114.600	Tetap	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	97.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan	97.200	Tetap	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**94 unit**	**685.106,300**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94 unit**	**938.780,700**		
	Penyediaan Jasa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau	15 unit	197.606,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	15 unit	210.715,600	Tambah	Suku cadang

No	APBD Tahun 2024				Perubahan RKPD Tahun 2024			Tetap/Kurang/Tambah	Keterangan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
	1	2	3	4	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	lapangan yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya			Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30 unit	15.750	Pemeliharaan Mebel	30 unit	15.750	Tetap	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	95.356,100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45 unit	145.356,100	Tambah	Pemeliharaan jaringan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	376.394	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	566.959	Tambah	Rehabilitasi bangunan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP**	**60%**	**741.659,162**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**60%**	**703.600,462**		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Jumlah PD yang menerapkan manajemen risiko**	**30 OPD**	**663.924,162**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**30 OPD**	**625.765,462**		
		Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang	**100%**			**100%**			

No	APBD Tahun 2024				Perubahan RKPD Tahun 2024			Tetap/Kurang/Tambah	Keterangan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
	1	2	3	4	8	9	10	11	12
		direviu							
		Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	**70%**			**100%**			
		Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	**90%**			**90%**			
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8 laporan	215.514	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 laporan	188.114	Kurang	Pengurangan belanja jasa tenaga administrasi
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 laporan	30.270	Reviu Laporan Kinerja	2 laporan	30.270	Tetap	-
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	79.518	Reviu Laporan Keuangan	119 laporan	79.518	Tetap	-
	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	60.000	Pengawasan Desa	35 laporan	60.000	Tetap	-
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	32.610,302	Kerjasama Pengawasan Internal	1 kesepakatan	20.410,302	Kurang	Pengurangan makan minum rapat dan honor narasumber karena kegiatan sudah dilakukan
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut	6 dokumen	246.011,860	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	6 dokumen	249.453,160	Kurang	Pengurangan tol

No	APBD Tahun 2024				Perubahan RKPD Tahun 2024			Tetap/Kurang/Tambah	Keterangan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
	1	2	3	4	8	9	10	11	12
	Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP			Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan**	**8 laporan**	**77.735**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**8 laporan**	**77.735**		
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	4 laporan	14.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 laporan	14.000	Tetap	-
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 laporan	63.735	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 laporan	63.735	Tetap	-
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)**	**10%**	**1.072.005**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIKAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**10%**	**1.057.688, 500**		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional**	**2 kegiatan**	**209.810**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**2 kegiatan**	**290.797**		
	Perumusan Kebijakan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di	1 rekomen	120.560	Perumusan Kebijakan Teknis	1 rekomen	185.347	Tambah	Penambahan goodie bag

No	APBD Tahun 2024				Perubahan RKPD Tahun 2024			Tetap/Kurang/Tambah	Keterangan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
	1	2	3	4	8	9	10	11	12
	Teknis di Bidang Pengawasan	bidang pengawasan yang disusun	dasi		di Bidang Pengawasan	dasi			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	89.250	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1 rekomendasi	105.450	Tambah	Penambahan honor narasumber dan makan minum rapat untuk kegiatan klinik konsultasi
	Pendampingan dan Asistensi	**Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi**	**52 OPD**	**862.195**	**Pendampingan dan Asistensi**	**52 OPD**	**766.891,500**		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	52 OPD	432.718	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52 OPD	323.789,500	Kurang	Pengurangan lembur
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	52 OPD	46.670	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52 OPD	46.670	Tetap	-
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan	349.107	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	3 kegiatan	375.582	Tambah	Penambahan makan minum rapat kegiatan hakordia

No	APBD Tahun 2024				Perubahan RKPD Tahun 2024			Tetap/Kurang/Tambah	Keterangan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
	1	2	3	4	8	9	10	11	12
	Korupsi				Korupsi				
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	52 OPD	33.700	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	52 OPD	20.850	Kurang	Pengurangan honorarium Tim SPI
	TOTAL			**13.783.858,142**			**13.704.004,850**		

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT KAB. NGANJUK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT							16.339.683.877,00	13.783.988.142,00	13.704.004.850,00	-1.635.678.827,00							15.708.000.000,00	
	8	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							16.339.683.877,00	13.783.988.142,00	13.704.004.850,00	-1.635.678.827,00							15.708.000.000,00	
	8.01	INSPEKTORAT DAERAH							16.339.683.877,00	13.783.988.142,00	13.704.004.850,00	-1.635.678.827,00							15.708.000.000,00	
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah				85 Nilai	85 Nilai	13.583.043.515,80	11.970.193.990,00	11.842.915.990,00	-288.343.915,00							13.294.600.000,00	
	8.01.01.2.01	Penyelenggaraan Pengelolaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun				14 dokumen	14 dokumen	49.540.000,00	108.140.000,00	71.767.000,00	22.227.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	kab. nganjuk		58.000.000,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.840.000,00	47.275.500,00	28.560.000,00	20.750.000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.085.000,00	15.718.500,00	15.718.500,00	9.633.500,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			8.000.000,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.085.000,00	15.718.500,00	15.718.500,00	9.633.500,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			8.000.000,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.085.000,00	0,00	0,00	-8.085.000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			8.000.000,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.085.000,00	0,00	0,00	-8.085.000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			8.000.000,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	11.908.000,00	27.427.500,00	11.775.000,00	-133.000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			16.000.000,00	INSPEKTORAT
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.085.000,00	0,00	0,00	-8.085.000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			8.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bersumber/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah				53 dokumen	53 dokumen	9.570.595.821,00	8.788.113.500,00	7.874.357.000,00	-1.696.229.821,00			-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kab. Nganjuk		9.848.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	9.476.759.821,00	8.114.591.000,00	7.794.058.000,00	-1.696.853.821,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			9.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				52 Dokumen	52 Dokumen	58.660.000,00	58.660.000,00	71.260.000,00	12.600.000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Penyusunan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	6.085.000,00	0,00	0,00	-6.085.000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			6.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (LKAT) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.842.500,00	14.842.500,00	9.021.000,00	-5.821.500,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			18.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	11.370.000,00	0,00	0,00	-11.370.000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				7 dokumen	-	17.730.000,00	50.451.000,00	50.451.000,00	32.721.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik,Hukum Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kab. Nganjuk		12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.440.000,00	9.471.000,00	9.471.000,00	7.031.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik,Hukum Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			2.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.440.000,00	0,00	0,00	-2.440.000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik,Hukum Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			2.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penelaan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Selisih/Bertambah (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			2 500 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	16 Laporan	6 440 000,00	40 980 000,00	40 980 000,00	32 540 000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			2 500 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			2 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah*				56 dokumen	56 dokumen	693 397 620,00	550 462 620,00	1 000 419 620,00	306 619 000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	kab. nganjuk		849 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pelayan Gaji beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pelayan Gaji beserta Atribut Kelengkapan				185 Paket	0 Paket	57 200 000,00	0,00	0,00	57 200 000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			42 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				58 Dokumen	55 Dokumen	8 585 000,00	0,00	0,00	-8 585 000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			7 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	552 406 620,00	899 816 620,00	722 236 620,00	169 430 000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			500 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				56 Orang	56 Orang	76 396 000,00	60 648 000,00	280 180 000,00	203 784 000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			300 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah*				91 Dokumen	93 Dokumen	551 426 278,00	551 426 278,00	675 926 778,00	124 500 500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	kab. nganjuk		982 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RPJPA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PENYESAIAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	29.097.130,00	29.097.130,00	29.097.130,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	13.902.600,00	13.902.600,00	13.902.600,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	16.759.000,00	16.759.000,00	21.002.000,00	4.243.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	158.706.195,00	158.706.195,00	158.706.195,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			190.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	32.478.850,00	32.478.850,00	32.478.850,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Kegiatan Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.032.500,00	12.032.500,00	15.970.000,00	3.937.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	246.450.000,00	246.450.000,00	312.450.000,00	66.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			442.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			250.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2029	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola				73 Unit	785 Unit	1.716.456.489,00	1.006.694.295,00	1.197.936.783,00	611.819.706,00			Meningkatkan Stabilitas Pelayanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kab. Nganjuk			780.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	5 Unit	868.482.214,00	0,00	0,00	452.482.214,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempercepat Stabilitas Pelayanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)				0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Meubel																		
			Jumlah Paket Meubel yang Disediakan				16 Unit	86 Unit	281.335.250,00	281.335.250,00	310.509.929,00	49.174.679,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempercepat Stabilitas Pelayanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)				130.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				78 Unit	56 Unit	796.839.026,00	749.388.029,00	797.129.956,00	1.512.187,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)				650.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				12 Laporan	12 Laporan	328.600.000,00	221.600.000,00	221.600.000,00	84.000.000,00			Mempercepat Stabilitas Pelayanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kab. Nganjuk			367.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempercepat Stabilitas Pelayanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)				12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	198.600.000,00	114.600.000,00	114.600.000,00	-84.000.000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempercepat Stabilitas Pelayanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)				250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	97.200.000,00	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempercepat Stabilitas Pelayanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)				125.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara				94 Unit	94 Unit	686.106.300,00	686.106.300,00	936.780.700,00	250.674.400,00			Mempercepat Stabilitas Pelayanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kab. Nganjuk			650.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Biaya untuk Pajak dan Perlengkapannya				12 Unit	12 Unit	187 608 200,00	187 608 200,00	210 715 800,00	23 107 600,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			250 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	15 750 000,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			35 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				181 Unit	181 Unit	95 358 100,00	95 358 100,00	145 358 100,00	50 000 000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			85 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	379 364 000,00	379 364 000,00	566 809 000,00	187 585 000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			250 000 000,00	INSPEKTORAT
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP				60 %	60 %	741 686 162,00	741 686 162,00	783 806 462,00	542 340 838,00							1 386 366 000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah PD yang menerapkan manajemen risiko Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu Presentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti Presentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti				100 % 30 OPD 70 % 90 %	100 % 38 OPD 70 % 80 %	693 924 162,00	693 924 162,00	825 765 462,00	35 155 700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kab. Nganjuk		985 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				6 Laporan	4 Laporan	215 514 000,00	215 514 000,00	188 114 000,00	28 400 000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			230 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	2 Laporan	30 270 000,00	30 270 000,00	30 270 000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			35 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				110 Laporan	110 Laporan	79 518 000,00	79 518 000,00	79 518 000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			70 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				100 Laporan	100 Laporan	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			120 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	32 610 302,00	32 610 302,00	30 410 302,00	12 200 000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pemulihan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			80 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				8 Dokumen	8 Dokumen	248 031 850,00	248 031 850,00	248 483 150,00	3 441 300,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pemulihan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			400 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan				5 Laporan	25 Laporan	77 736 000,00	77 736 000,00	77 736 000,00	0,00			-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	kab. nganjuk		300 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Pelaksanaan Pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				0 Laporan	1 Laporan	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			80 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				4 Laporan	21 Laporan	63 736 000,00	63 736 000,00	63 736 000,00	0,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			220 000 000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan PCP (Pravel Control Planning)				10 %	10 %	1 004 981 600,00	1 072 008 500,00	1 067 888 500,00	65 019 000,00							1 280 000 000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional				2 kegiatan	2 kegiatan	240 662 000,00	209 410 000,00	250 791 000,00	41 115 000,00			Memperkuat Stabilitas Pemulihan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	kab. nganjuk		210 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	120 462 000,00	120 960 000,00	165 347 000,00	24 915 000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pemulihan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			70 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	89 250 000,00	89 250 000,00	105 450 000,00	16 200 000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pemulihan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			130 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah perangkat daerah yang memiliki pleno mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi				52 OPD	52 OPD	755 269 000,00	810 195 000,00	788 881 500,00	11 592 500,00			Memperkuat Stabilitas Pemulihan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	kab. nganjuk		380 000 000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Semakin/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				52 perangkat daerah	52 perangkat daerah	325 822 000,00	432 715 000,00	323 759 500,00	2 062 500,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov);			400 000 000,00	INSPEKTORAT
	5.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				52 perangkat daerah	52 perangkat daerah	46 870 000,00	46 870 000,00	46 870 000,00	0,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			90 000 000,00	INSPEKTORAT
	5.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	349 107 000,00	349 107 000,00	375 582 000,00	26 475 000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			300 000 000,00	INSPEKTORAT
	5.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				52 perangkat daerah	52 perangkat daerah	33 700 000,00	33 700 000,00	20 850 000,00	12 850 000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov);			90 000 000,00	INSPEKTORAT
		JUMLAH							15 329 983 877,00	13 793 856 142,00	13 704 004 950,00	1 638 978 927,00							19 705 000 000,00	

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, berikut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat yang mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal tahun 2024.

Tabel 3.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 Pendukung Standar Pelayanan Minimal

No.	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
			NIHIL			

Tabel 3.4

Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
			NIHIL			

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Nganjuk Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026, sehingga target kinerja tahun 2024 dapat dicapai dengan optimal.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Nganjuk Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPD dan Renstra Inspektorat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Inspektorat Daerah Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Inspektorat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah; dan

c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Inspektorat Daerah.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan
3. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Inspektorat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001